

## **Kebijakan Fiskal**

**Faris Ardiansyah (191020700126)**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

### **Abstrak**

Kebijakan Fiskal Di Indonesia Merujuk Pada Kebijakan Pemerintah Yang Ditujukan Untuk Mengarahkan Ekonomi Suatu Negara Lewat Pengeluaran Serta Pendapatan Pemerintah. Lantas, Dari Sinilah Muncul Pertanyaan Mengenai Tentang Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal Adalah Kebijakan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Guna Mengelola Dan Mengarahkan Kondisi Perekonomian Ke Arah Yang Lebih Baik Atau Yang Diinginkan Dengan Cara Mengubah Atau Memperbarui Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah, Saalah Satu Hal Yang Ditonjolkan Dari Kebijakan Fiskal Ini Adalah Pengendalian Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah Atau Negara.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Fiskal



## **PENDAHULUAN**

Kebijakan Fiskal Adalah Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Anggaran Dan Belanja Negara Yang Bertujuan Untuk Mempengaruhi Jalannya Perekonomian. Kebijakan Fiskal Bukan Semata-Mata Kebijakan Dalam Bidang Perpajakan, Akan Tetapi Menyangkut Bagaimana Mengelola Pemasukan Dan Pengeluaran Negara Untuk Mempengaruhi Perekonomian. Kebijakan Fiskal Memiliki Tujuan Yang Persis Dengan Kebijakan Moneter. Perbedaan Tersebut Terletak Pada Instrument Kebijakan Yang Diterapkannya, Yaitu Dalam Kebijakan Moneter Pemerintah Mengendalikan Jumlah Uang Yang Beredar, Sedangkan Dalam Kebijakan Fiskal Pemerintah Mengendalikan Penerimaan Dan Pengeluarannya.

Kebijakan Ekonomi Suatu Negara Tidak Bisa Lepas Dari Campur Tangan Pemerintah, Karena Pemerintah Memegang Kendali Atas Segala Sesuatu Yang Menyangkut Semua Kebijakan Yang Bermuara Kepada Keberlangsungan Negara Itu Sendiri. Kebijakan Ekonomi Sangat Beragam Dan Bermacam-Macam Pula Kebijakannya. Oleh Sebab Itu, Pemerintah Wajib Menganut Salah Satu Kebijakan Ekonomi Sebagai Dasar Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah. Apapun Sistem Ekonomi Yang Dianut Pemerintah, Maka Itulah Sistem Ekonomi Yang Terbaik Bagi Perekonomian Rakyat, Meskipun Nantinya Dalam Perjalanannya Memiliki Berbagai Kelemahan.

Kebijakan Ekonomi Pasti Memiliki Fenomena Yang Berdampak Positif Dan Negatif, Salah Satu Dampak Negatif Yang Sering Terjadi Adalah Inflasi. Inflasi Merupakan Fenomena Yang Timbul Akibat Banyaknya Jumlah Uang Yang Beredar, Kenaikan Biaya Produksi, Besarnya Tarikan Permintaan Dari Konsumen, Dan Adanya Inflasi Tularan Dari Luar Negeri. Akibatnya Akan Mempengaruhi Perekonomian Didalam Negeri Dan Semakin Bertambahnya Pengangguran. Selain Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi, Juga Memiliki Dampak Positifnya, Yaitu Memudahkan Pemerintah Untuk Mengatur Perekonomian Dan Anggaran Pembelajaan Negara. Sehingga, Dengan Kebijakan Ini Maka Hasil Yang Didapatkan Digunakan Untuk Keperluan Didalam Negeri Dan Keperluan Rakyat

## **PEMBAHASAN**

### **1. Asal Mula Kebijakan Fiskal**

Kesadaran Terhadap Pengaruh Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah Belum Lama Muncul Dalam Dunia Ilmu Pengetahuan. Maka Timbulah Gagasan Dengan Sengaja Untuk Mengubah-Ubah Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah Guna Mencapai Kesetabilan Ekonomi. Teknik Mengubah Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah Inilah Yang Dikenal Dengan Kebijakan Fiskal Atau Politik Fiskal. Sebelum Tahun 1920-An, Pengeluaran Pemerintah Hanya Dianggap Sebagai Alat Untuk Membiayai Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Dan Dinilai Atas Dasar Asas Manfaat Langsung Yang Dapat Ditimbulkannya Tanpa Melihat Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional. Sebaliknya Pajak Hanya Sebagai Sumber Pembiayaan Pengeluaran Negara Dan Belum Diketahui Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional.

Akibatnya Dalam Masa Depresi Di Mana Penerimaan Pemerintah Menurun, Maka Pengeluaran Pemerintah Harus Dikurangi Pula. Hal Ini Berpengaruh Terhadap Pendapatan Nasional Serta Semakin Lesunya Perekonomian. Kalau Timbul Deflasi Atau Inflasi Kebijakan Yang Diambinya Adalah Kebijakan Moneter Lewat Bank Sentral Dan Bukan Kebijakan Fiskal. Pada Masa Depresi Pada Tahun 1930-An Teori Kebijakan Fiskal Pertama Kali Mulai Muncul Karena Tidak Mempunyai Kebijakan Moneter Dalam Menanggulangi Depresi Itu. Kebijakan Moneter Berguna Untuk Merangsang Kegiatan Individu Atau Swasta. Pada Saat Terjadi Pengangguran Harga-Harga Turun Deoresi, Maka Oleh Kebijakan Moneter Dengan Cara Menambah Jumlah Uang Yang Beredar Lewat Politik Dengan Menurunkan Tingkat Bunga Atau Dengan Politik Pasar Terbuka, Dimana Pemerintah Membeli Surat Berharga. Pada Masa Depresi Yang Paling Amat Parah Adalah Masalah Pengangguran Dan Kebijakan Fiskal Berorientasi Maslah Pengguran Dan Masalah Ingflasi.

Dasar Pemikiran Dalam Kebijakan Fiskal Ialah Bahwa Pemerintah Tidak Dapat Disamakan Dengan Individu Dalam Pengaruh Dari Tindakan Masing-Masing Terhadap Masyarakat Sebagai Keseluruhan. Umumnya Para Individu Akan Mengurangi Pengeluaran Apabila Penerimaanya Menurun, Sedangkan Pemerintah Tidak Harus Berbuat Demikian, Karena Apabila Perintah Mengurangi Pengeluarannya, Maka Tindakan Ini Akan Lebih Menyusahkan Atau Memperberat Jalannya Perekonomian Karena

Menurunnya Pengeluaran Pemerintah Akan Berarti Menurunnya Pendapatan Masyarakat Sebagai Objek Pajak Dan Justru Memperkecil Penerimaan Pemerintah Lagi. Di Samping Itu Juga Disadari Bahwa Dalam Masa Depresi Banyak Dana Masyarakat (Swasta) Yang Menganggur, Sehingga Peningkatan Dalam Pengeluaran Pemerintah Tidak Akan Mengurangi Investasi Sektor Swasta Lewat Kenaikan Tingkat Bunga.

## **2. Pengertian Kebijakan Fiskal**

Fiskal Adalah Sebuah Kata Yang Dirujuk Dari Bahasa Latin, *Fiscus* Yang Berarti Pemegang Kuasa Dari Keuangan Pertama Di Zaman Romawi Kuno. Sedangkan, Kbbi Mengartikan Fiskal Sebagai Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Urusan Pendapatan Negara Atau Pajak. Kebijakan Fiskal Pertama Kali Dicituskan Oleh John Maynard Keynes Asal Inggris Pada Tahun 1883. Berdasarkan Pendapat John Maynard Keynes Tersebut, Kebijakan Fiskal Dapat Membantu Negara Mencapai Kestabilan Ekonomi Dan Bisnis. Hal Ini Dikarenakan Kebijakan Tersebut Mampu Menyusuaikan Pengeluaran Negara Dengan Pendapatan Yang Diterima Dari Pajak.

Menurut Keynes, *Fiscal Policy* Yang Dilakukan Dalam Jangka Panjang Mampu Mengatasi Masalah Ekonomi Yang Terjadi Dalam Sebuah Negara. Serta, Dianggap Bisa Menyelesaikan Masalah Internal Makro Lainnya, Seperti Inflasi, Lemahnya Kurs Mata Uang, Hingga Minimnya Lapangan Kerja Yang Tersedia. Kebijakan Fiskal Adalah Salah Satu Kebijakan Ekonomi Yang Dicanangkan Suatu Negara Untuk Mengelola Serta Mengarahkan Perekonomian Ke Kondisi Yang Lebih Kondusif. Cara Yang Ditonjolkan Dari Kebijakan Ekonomi Ini Adalah Dengan Mengubah Maupun Memperbarui Pengelolaan Pendapatan Dan Pengeluaran Negara. Inti Dari Kebijakan Fiskal Adalah Sebagai Upaya Pengelolaan Dana Yang Diterima Dari Pajak Untuk Memenuhi Keperluan Masyarakat Dalam Skala Yang Lebih Luas. Dengan Begitu, Tujuan Dari Strategi Ini Dapat Tercapai Sesuai Dengan Harapan. Seperti Tersedianya Fasilitas Publik Dan Pelayanan Kesehatan Yang Mumpuni.

## **3. Instrumen Kebijakan Fiskal**

Untuk Mencapai Tujuannya, Kebijakan Fiskal Dilakukan Menggunakan Berbagai Instrumen.

**a. Anggaran Belanja Seimbang**

Anggaran Belanja Seimbang Merujuk Kepada Anggaran Yang Disesuaikan Dengan Keadaan Atau Kondisi Perekonomian. Hal Ini Bertujuan Agar Dalam Jangka Panjang, Anggaran Dapat Menjadi Berimbang. Apabila Terjadi Ketidakstabilan Ekonomi Anggaran Defisit Akan Digunakan, Sementara Anggaran Surplus Akan Digunakan Dalam Masa Inflasi.

**b. Stabilitas Anggaran Otomatis**

Stabilitas Anggaran Otomatis, Yaitu Penekanan Pengeluaran Pemerintah Harus Bermanfaat Dan Memiliki Biaya Relative Dari Berbagai Program Kegiatan

**c. Pengelolaan Anggaran**

Artinya, Hubungan Belanja Pemerintah Dengan Penerimaan Pajak Secara Langsung Digunakan Untuk Memperkecil Ketidakstabilan Ekonomi Dengan Menyesuaikan Anggaran

**d. Pembiayaan Fungsional**

Pembiayaan Ini Merujuk Kepada Pengeluaran Pemerintah Yang Diatur Untuk Menghindari Pengaruh Langsung Terhadap Pendapatan Nasional. Tujuan Utamanya Adalah Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja.

**4. Macam-Macam Kebijakan Fiskal**

Dalam Perkembangan Kebijakan Fiskal Dapat Dibedakan Menjadi Empat Macam Atas Dasar:

**a. Pembiayaan Fungsional (*Functional Finance*)**

Tokoh Dari Kebijakan Fiskal Ini Adalah Ap.Lener. Dalam Hal Ini Pengeluaran Pemerintah Dengan Melihat Akibat-Akibat Terhadap Pendapan Nasional Terutama Guna Meningkatkan Kesempatan Kerja (*Employment*). Di Lain Pihak Pajak Dipakai Untuk Mengatur Pengeluaran Swasta Dan Bukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pemerintah, Sehingga Pada Saat Ada Pengangguran Pajak Sama Sekali Tidak Diperlukan. Selanjunya Pinjaman Akan Dipakai Sebagai Alat Untuk Menekan Inflasi Lewat Pengangguran Dana Yang Tersedia Dalam Masyarakat. Kemudian Apabila Pajak Maupun Pinjaman Dirasa Tidak Tepat Maka Ditempuh Pencetakan Uang. Jadi Pengeluaran Pemerintah Dan Perpajakan Dipertimbangkan Sebagai Suatu Hal Yang Terpisah, Namaun Demikian Ada

Khawatiran Bahwa Tanpa Ada Hubungan Langsung Antara Keduanya Akan Ada Bahayanya Karena Kemungkinan Pengeluaran Pemerintah Semakin Berlebihan.

**b. Pengelolaan Anggaran**

Pendekatan Ini Lebih Banyak Disukai Dari Pada Pendekatan “Pembelajaan Fungsional” Karena Pengeluaran Pemerintah, Perpajakan Dan Pinjaman Dimaksudkan Untuk Pencapaian Kesetabilan Ekonomi Yang Lebih Mantap. Dalam Pendekatan Ini, Hubungan Antara Pengeluaran Perintah Dan Perpajakan Selalu Dipertahankan, Tetapi Penyesuaian Dalam Anggran Selalu Dibuat Guna Memperkecil Ketidakstabilan Ekonomi, Sehingga Pada Suatu Saat Dapat Terjadi Deficit Maupun Surplus. Tokoh Dalam Pendekatan Ini Adalah Alvin Hasen Yang Menyarankan Bahwa Dalam Masa Depresi Di Mana Banyak Pengguran, Pengeluaran Perintah Adalah Satu-Satunya Obat.

Dalam Perkembangan Pemikiran Lebih Lanjut, Penggunaan Anggaran Belanja Yang Seimbang Untuk Jangka Panjang Diperlukan Dengan Catatan Bahwa Dalam Masa Depresi Ditempuh Anggaran Defisit Sedangkan Dalam Masa Inflasi Ditempuh Anggaran Belanja Surplus. Dalam Perkembangan Yang Lebih Jauh Lagi, Pendekatan Ini Selalu Berusaha Untuk Mempertahankan Adanya Anggaran Belanja Yang Seimbang Tanpa Deficit Anggaran Belanja. Sehingga Dalam Masa Defresi (Perekonomian Lesu) Pengeluaran Pemerintah Akan Ditingkatkan Dan Penerimaan Dari Pajakpun Akan Ditingkatkan Pula Tetapi Jangan Sampai Menimbulkan Deplasi.

Sebaliknya Dalam Masa Inflasi, Pajak Akan Dimanfaatkan Sebaik-Baiknya Guna Mencegah Timbulnya Akibat Inflasi Yang Tidak Diinginkan. Kebaikan Dari Pendapat Ini ialah Bahwa Pinjaman Negara Tidak Akan Meningkat, Tetapi Sayangnya Sektor Swasta Menjadi Kurang Bersemangat Karena Kurang Percaya Pada Diri Sendiri.

**c. Stabilisasi Anggaran Otomatis**

Pada Akhir Tahun 1940-An Kepercayaan Lebih Banyak Diberikan Kepada Mekanisme Otomatis Dari Politik Fiskal. Penyesuaian Secara Otomatis Dalam Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Terjadi Sedemikian Rupa Sehingga Membawa Pada Perekonomian Menjadi Stabil Tanpa Campur Tangan Pemerintah Yang Disengaja. Dengan Stabilitas Otomatis, Pengeluaran Pemerintah Akan Ditentukan Berdasar Atas Perkiraan Manfaat Dan Biaya Relatif Dari Berbagai Macam Program Dan Pajak Akan Ditentukan Sehingga Menimbulkan Surplus Dalam Periode Kesempatan Kerja Penuh.

Apabila Ada Kemunduran Dalam Kegiatan Usaha, Program Pengeluaran Pemerintah Dan Perpajakan Tidak Akan Diubah, Namun Penerimaan Dari Pajak Akan Menurun, Terutama Dari Pajak Pendapata.

Di Lain Pihak Jumlah Pengeluaran Pemerintah Akan Meningkatkan Terutama Yang Dikaitkan Dengan Gaji, Pensiun, Bantuan Sosial Dan Sebagainya. Akibat Defisit Dalam Anggaran Belanja Pemerintah Muncul Dan Mendorong Perkembangan Sektor Swasta Kembali Sampai Tercapinya Kesempatan Kerja Penuh. Sebaliknya Dalam Masa Inflasi Ada Kenaikan Dalam Penerimaan Pemerintah Yang Berasal Dari Pajak Pendapan Tidak Perlu Banyak Tunjangan Pengangguran, Sehingga Akan Ada Surplus Anggaran Belanja. Peranan “*Built In Flexibility*” Ini Dapat Ditingkatkan Dengan Penambahan Pengeluaran Pemerintah Pada Proyek-Proyek Pekerjaan Umum.

#### **d. Anggaran Belanja Seimbang**

Suatu Modifikasi Dari Atas Anggaran Yang Disesuaikan Dengan Keadaan (*Managed Bidget*) Adalah Pebelajaran Secara Seimbang Dalam Jangka Panjang, Tetapi Ditempuh Pada Masa Depresi Dan Surplus Pada Masa Inflasi. Kegagalan Dalam Mempertimbangkan Keseimbangan Anggaran Dalam Jangka Panjang Dapat Menimbulkan Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. Dapat Pula Diikuti Pendekatan Serupa Tetapi Tetap Mempertahankan Keseimbangan Anggaran. Dalam Masa Depresi, Pengeluaran Perlu Ditingkatkan Diikuti Pula Dengan Peningkatan Penerimaan Sehingga Tidak Akan Memperbesar Utang Negara.

### **5. Tujuan Kebijakan Fiskal**

Secara Garis Besar, Tujuan Dari Kebijakan Fiskal Ialah Untuk Mempengaruhi Jalannya Perekonomian Dalam Suatu Negara Dengan Berbagai Sasaran Seperti Berikut Ini:

#### **a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Serta Pdb Suatu Negara**

Kebijakan Fiskal Memiliki Tujuan Guna Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Secara Maksimal Sebab Sangat Berperan Dalam Pemasukan Atau Pendapatan Negara. Hal Itu Meliputi: Bea Dan Cukai, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Devisa Negara, Impor, Pariwisata, Dan Lain Sebagainya. Tak Hanya Itu, Contoh Pengeluaran Negara Yang Dimaksud Yaitu:

- a) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum.
- b) Pesawat Dan Program Lain Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

- c) Belanja Persenjataan.
- d) Proyek Pemerintah.

**b. Mengurangi Angka Pengangguran Dan Memperluas Lapangan Kerja.**

Karna Bukan Rahasia, Kalau Pengangguran Merupakan Salah Satu Pokok Masalah Dalam Suatu Negara. Di Indonesia Sendiri, Tingkat Pengangguran Telah Berkurang Sebanyak 140.000 Jiwa. Dalam Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka, Dalam Bulan Februari Tahun 2017 Angkanya Mencapai Hingga 5,33%, Dan Dalam Bulan Februari Tahun Ini Angkanya Telah Berkurang Di Level 5,13%. Hal Itu, Tak Lepas Dari Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Indonesia. Kebijakan Fiskal Memang Dilakukan Serta Menjadi Prioritas Utama Dalam Usaha Pencegahan Timbulnya Angka Pengangguran.

**c. Menstabilkan Harga Berbagai Produk Serta Mengatasi Terjadinya Inflasi.**

Turunnya Dari Harga Suatu Produk Tentunya Membuat Hilangnya Harapan Dalam Mendapat Keuntungan Terhadap Sektor Swasta. Namun, Harga Suatu Produk Yang Terus Meningkat Juga Dapat Mengakibatkan Terjadinya Inflasi. Di Sisi Lain, Inflasi Dapat Juga Memberikan Keuntungan, Contohnya Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh. Namun Lagi-Lagi, Inflasi Juga Dapat Berdampak Negatif Terhadap Suatu Kelompok Atau Orang Yang Memiliki Penghasilan Rendah Sebab Daya Beli Menjadi Turun.

Permasalahan Inflasi Yang Tidak Kunjung Stabil Memiliki Potensi Besar Dalam Membuat Keyakinan Masyarakat Kepada Pemerintah Menjadi Berkurang. Melalui Kebijakan Fiskal, Tingkat Dari Pendapatan Nasional, Kesempatan Kerja, Tinggi Rendahnya Investasi Nasional, Serta Distribusi Penghasilan Nasional Pun Diharapkan Mampu Berjalan Dengan Baik.

**6. Tujuan Utama Kebijakan Fiskal**

Umumnya Tujuan Yang Ingin Dicapai Oleh Kebijakan Fiskal Adalah Kesetabilan Ekonomi Yang Lebih Mantap Artinya Tetap Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Mantap Artinya Tetap Mempertahankan Laju Ekonomi Yang Layak Tanpa Adanya Pengangguran Yang Berarti Di Satu Pihak Atau Adanya Ketidakstabilan Harga-Harga Umum. Kesetabilan Ekonomi Tidak Berarti Kesetabilan Harga Untuk Semua Sektor Perekonomian, Karena Perubahan Harga Relatif Sangat Diperlukan Bagi Penyesuaian Dalam Perubahan Teknologi, Preferensi Konsumen Dan Tersedianya Faktor Produksi, Agar Penggunaan Optimum Dalam Penggunaan Sumber Daya Ekonomi Dapat Terealisasi.

### **a. Mencegah Pengangguran**

Pencegahan Timbulnya Pengangguran Merupakan Tujuan Tama Dari Kebijakan Fiskal. Kegagalan Dalam Mencapai Kesempatan Kerja Penuh Tidak Hanya Berarti Tidak Tercapinya Tingkat Pendapatan Nasional Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Optimum, Tetapi Juga Berakibat Kurangnya Menyenangkan Bagi Perorangan Yang Menderita Atau Yang Mengalami Pengguran. Kesempatan Kerja Penuh (*Full Employment*) Dapat Kita Artikan Sebagai Keadaan Di Mana Semua Pemilik Faktor Produksi Yang Ingin Memperkerjakannya Pada Tingkat Harga Atau Upah Yang Berlksu Dapat Memperoleh Pekerjaan Bagi Faktor-Faktor Produksi Tersebut.

Konsep Kesempatan Kerja Ini Di Hubungkan Dengan Kesempatan Kerja Manusia, Karena Pengangguran Tenaga Kerja Manusia Inilah Yang Mempunyai Pengaruh Soaial Yang Sangat Luas. Dengan Definisi Di Atas Maka Pencapain Tenaga Kerja Penuh Itu Sangat Sukar Tercapai, Karena Pada Setiap Saat Tentu Ada Faktor-Faktor Produksi Yang Kehilangan Lapangan Kerja Dan Pada Saat Ini Pula Belum Mendapat Pekerjaan Berhubungan Dengan Adanya Ketidak Sempurnaan Pasar.

### **b. Stabilitas Harga**

Aspek Kedua Dari Kebijakan Fiskal Adalah Mempertahankan Kesetabilan Harga Umum Pada Tingkat Yang Layak. Pneurunan Yang Tajam Dalam Harga-Harga Umum Jelas Akan Mendorong Timbulnya Pengangguran Karena Sektor Swasta Akan Kehilangan Harapan Keuntungan, Bahkan Keuntungan Mereka Akan Semakin Mengecil. Selanjtnya Investasi Sektor Swasta Dapat Tidak Ada Lagi Lebih-Lebih Bila Mereka Mengharapkan Harga-Harga Akan Turun Terus Sebaliknya Harga-Harga Umum Yang Meningkatkan Terus Juga Mempunyai Akibat Yang Tidak Menggembirakan.

Inflasi Memang Dapat Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh Dan Memberikan Keuntungan Kepada Beberapa Kelompok Orang, Tetapi Juga Mempersulit Kehidupan Orang-Orang Yang Berpenghasilan Rendah Dan Terutama Mereka Yang Berpenghasilan Tetap. Inflasi Yang Deras Akan Cenderung Melemahkan Juga Sektor Usaha Swasta Karena Investasi Produktif Umumnya Berubah Menjadi Investasi Barang-Barang Tahan Lama Seperti Rumah, Tanah Dan Sebagainya. Dalam Jangka Panjang Inflasi Akan Berakibat Pada Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintahnya.

**c. Menekan Pengeluaran Negara**

Tujuan Selanjutnya Dari Kebijakan Fiskal Adalah Untuk Memperkecil Pengeluaran Anggaran Negara. Pada Dasarnya Kebijakan Tersebut Akan Mengatur Pengeluaran Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Ke Hal-Hal Yang Lebih Diprioritaskan Dan Meningkatkan Beban Pajak. Sehingga, Anggaran Negara Tidak Akan Bergerak Ke Arah Defisit. Jika Dilakukan Dengan Tepat, Kebijakan Fiskal Mampu Meningkatkan Iklim Ekonomi Negara. Saat Perekonomian Negara Bergerak Maju Dan Meyakinkan, Akan Ada Banyak Investor Yang Berdatangan. Dengan Begitu, Laju Investasi Negara Akan Lebih Pesat Dan Pendapatan Negara Akan Naik Secara Drastis Karena Pajak Yang Didapat Dari Investasi Para Pengusaha.

**7. Jenis Kebijakan Fiskal**

**a. Kebijakan Fiskal Ekspansif (*Expansionary Fiscal Policy*)**

Kebijakan Fiskal Ekspansif Dirancang Dengan Tujuan Untuk Merangsang Ekonomi, Kebijakan Ini Paling Sering Manfaatkan Selama Waktu Resesi, Pada Saat Pengangguran Mencapai Angka Yang Tinggi Atau Pada Saat Periode Siklus Bisnis Sedang Rendah. Kebijakan Ekspansif Ini Juga Mengharuskan Pemerintah Supaya Membelanjakan Lebih Banyak Uang, Menurunkan Pajak, Atau Bahkan Melakukan Keduanya.

Tujuannya ialah Untuk Memberikan Lebih Banyak Uang Kepada Konsumen Sehingga Konsumen Akan Terus Membelanjakan Lebih Banyak Sehingga Akan Merangsang Laju Ekonomi Negara.

**b. Kebijakan Fiskal Kontraksional**

Digunakan Guna Memperlambat Laju Pertumbuhan Ekonomi, Contohnya Pada Saat Inflasi Tumbuh Pesat. Hal Ini Tentunya Merupakan Kebalikan Dari Kebijakan Fiskal Ekspansif, Dimana Kebijakan Fiskal Kontraktif Akan Meningkatkan Pajak Serta Memotong Pengeluaran.

**8. Jenis Kebijakan Fiskal Berdasarkan Teori:**

- a. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Fungsional: Untuk Mengatur Pengeluaran Oleh Pemerintah Dengan Cara Memperhatikan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Dalam Hal Kesempatan Kerja.

- b. Kebijakan Pengelolaan Anggaran: Mengatur Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pajak Serta Pembiayaan Guna Mencapai Laju Perekonomian Yang Stabil.
- c. Kebijakan Stabilisasi Anggaran Otomatis: Mengatur Jumlah Pengeluaran Pemerintah Dengan Cara Menimbang Serta Menganalisa Biaya Dan Juga Manfaat Dari Berbagai Macam Pengeluaran Yang Digunakan.

## **9. Kebijakan Fiskal Dari Jumlah Penerimaan & Pengeluaran**

### **a. Anggaran Dinamis**

Mempunyai Ciri Dimana Anggarannya Selalu Meningkatkan Daripada Anggaran Pada Tahun Sebelumnya. Hal Tersebut Dilakukan Dengan Upaya Meningkatkan Pendapatan Serta Melakukan Penghematan Dalam Sisi Pengeluaran, Sehingga Tabungan Dari Pemerintah Bisa Meningkatkan Dengan Cepat.

### **b. Anggaran Defisit**

Mempunyai Ciri Dimana Anggaran Disusun Dari Jumlah Pengeluaran Lebih Besar Dibandingkan Oleh Pendapatan Negara. Hal Ini Biasanya Diatasi Dengan Beberapa Kebijakan Yang Berlaku, Seperti: Menciptakan Uang Baru, Melakukan Pinjaman Atau Hutang (Dalam/Luar Negeri).

Mulai Tahun 2000, APBN Di Negara Indonesia Disusun Dengan Menggunakan Format Anggaran Defisit Yang Dimana Akan Dibiayai Dengan Sumber-Sumber Pembiayaan Dalam Negeri

### **c. Anggaran Surplus**

Mempunyai Ciri Dimana Jumlah Pendapatan Lebih Besar Dibandingkan Dengan Jumlah Pengeluaran Total Oleh Pemerintah.

### **d. Anggaran Seimbang**

Dalam Hal Ini, Anggaran Akan Disusun Dengan Jumlah Total Pendapatan Sama Dengan Jumlah Pengeluaran Total Sehingga Nantinya Stabilitas Ekonomi Bisa Terjaga.

## **10. Manfaat Dari Diberlakukannya Kebijakan Fiskal**

Sudah Umum Dipahami Jika Tanggung Jawab Dari Pemerintah Adalah Untuk Menjaga Serta Menjalankan Dengan Baik Perekonomian Negara. Dengan Kondisi Perekonomian Yang Baik Dan Stabil, Rakyat Mampu Mendapatkan Taraf Hidup Yang Lebih Sejahtera. Sebaliknya, Jika Kondisi Ekonomi Negara Sedang Kacau, Yang Menerima Dampak Negatifnya Sudah Pasti Masyarakatnya Juga. Agar Perekonomian Negara Dapat

Pulih Dari Keterpurukan, Dikeluarkanlah Kebijakan Fiskal Oleh Pemerintah. Alasan Utamanya Karena Kebijakan Tersebut Mampu Memberikan Beragam Manfaat Yang Dibutuhkan Negara Dan Masyarakat. Berikut Ulasannya:

**a. Dapat Menumbuhkan Kondisi Ekonomi Yang Lebih Baik**

Manfaat Utama Dari Kebijakan Fiskal Adalah Membuat Ekonomi Negara Bertumbuh Ke Arah Yang Lebih Baik. Hal Ini Tentu Dilakukan Untuk Kebaikan Negara.

**b. Pengalokasian Sumber Daya Yang Lebih Efektif Dan Tepat Sasaran**

Saat Melakukan Kebijakan Fiskal, Pemerintah Akan Mengelola Jumlah Uang Kas Yang Masuk Untuk Kebutuhan Internal Yang Lebih Penting Dan Berpengaruh Positif Pada Masyarakat Luas. Kebutuhan Internal Tersebut Bisa Meliputi Pemberian Fasilitas Publik, Jaminan Sosial Yang Lebih Memadai, Dan Lain Sebagainya. Yang Penting Adalah Pengeluaran Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Hanya Pada Hal-Hal Yang Krusial Dan Dapat Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatnya. Dengan Begitu, Rakyat Tetap Bisa Menjalankan Aktivitas Rutinnya Seperti Biasa Dan Tetap Menjadi Produktif.

**c. Menstabilkan Kondisi Ekonomi Negara Jangka Pendek**

Kondisi Perekonomian Dunia Yang Tidak Stabil Dan Fluktuatif Membuat Pemerintah Harus Proaktif Menganangkan Kebijakan Fiskal Yang Dianggap Perlu Untuk Diaplikasikan. Salah Satu Contoh Ketidak-Stabilan Kondisi Ekonomi Negara Adalah Saat Harga Pangan Atau Suatu Komoditas Mengalami Krisis Dan Harganya Melambung Tinggi. Alhasil, Daya Beli Konsumen Akan Kebutuhan Tersebut Menjadi Berkurang Dan Pemerintah Perlu Menstabilkan Harganya Kembali.

Pemerintah Bisa Mengeluarkan Kebijakan Berupa Penurunan Pajak Dari Penjualan Komoditas Tersebut Sehingga Harga Jualnya Menjadi Sedikit Lebih Terjangkau. Dalam Kasus Yang Berbeda, Yang Mana Kondisi Ekonomi Negara Sedang Kacau Karena Inflasi Berskala Besar, Pemerintah Dapat Membatasi Pembelanjaan Negara. Jika Jumlah Uang Yang Beredar Di Masyarakat Terlalu Banyak, Kebijakan Fiskal Yang Dikeluarkan Pemerintah Adalah Menaikkan Pajak Yang Dibebankan Kepada Masyarakat.

**d. Pemerintah Mampu Melakukan Pengembangan Pada Pembangunan Jangka Panjang Negara**

Melalui Pembangunan Berjangka Panjang Tersebut, Pertumbuhan Ekonomi Yang Diharapkan Dapat Tercapai. Dengan Begitu, Masyarakat Dapat Memiliki Kondisi Ekonomi Yang Lebih Stabil, Fasilitas, Serta Infrastruktur Publik Yang Lebih Memadai.

**11. Contoh Kebijakan Fiskal Yang Pernah Diterapkan Pemerintahan Indonesia**

Dalam Beberapa Kurun Waktu Belakangan, Pemerintah Indonesia Telah Beberapa Kali Menerapkan Kebijakan Fiskal Untuk Meredam Terpaan Kondisi Ekonomi Dunia. Kebijakan Ekonomi Tersebut Terbukti Berhasil Membuat Ekonomi Indonesia Bergerak Ke Arah Yang Positif Dan Lebih Kondusif.

**a. Tax Amnesty**

Contoh Kebijakan Fiskal Pertama Yang Dilakukan Pemerintah Adalah Pada Saat Presiden Jokowi Mencanangkan Program Amnesti Pajak Di Tahun 2017 Lalu. Banyaknya Laporan Penunggakan Pajak Dan Individu Yang Tidak Melaporkan Jumlah Kekayaan Kala Itu Membuat Pemerintah Memutuskan Untuk Meluncurkan Program *Tax Amnesty*.

Dihilangkannya Sanksi Administrasi, Pidana, Dan Juga Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Mampu Membuat Pemasukkan Negara Meningkatkan Hingga 130 Triliun Rupiah. Ini Adalah Sebuah Bukti Nyata Mengapa Kebijakan Tersebut Perlu Dilakukan Oleh Sebuah Negara.

**b. Subsidi Bahan Bakar Minyak**

Pengurangan Jumlah Subsidi Bbm Yang Seringkali Dilakukan Oleh Pemerintah Belakangan Terakhir Juga Merupakan Contoh Kebijakan Fiskal Lainnya. Meski Harga Jual Bahan Bakar Menjadi Lebih Mahal Dan Tidak Stabil, Pemerintah Mampu Mengalokasikan Dana Yang Dimiliki Untuk Kebutuhan Lain Yang Lebih Penting Dan Mendesak. Dengan Begitu, Kualitas Hidup Masyarakat Luas Akan Menjadi Lebih Berdaya

**12. Kebijakan Fiskal Membantu Ekonomi Tetap Stabil**

Disadari Atau Tidak, Kebijakan Fiskal Sebenarnya Cukup Mudah Ditemui Sebagai Upaya Pemerintah Untuk Mensejahterakan Rakyat. Tanpa Memiliki Sikap Proaktif Dalam Mengeluarkan Kebijakan Tersebut, Bukan Tidak Mungkin Pemerintah Akan Membuat

Negara Akan Bergerak Ke Kondisi Ekonomi Yang Tidak Sehat. Untuk Itu, Pahami Tentang Apa Itu Kebijakan Fiskal Dan Pengaruhnya Pada Keadaan Agar Cita-Cita Indonesia Menjadi Negara Maju Dapat Terwujud

### **13. Kebijakan Fiskal Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Kebijakan Fiskal Merupakan Tindakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Dalam Bidang Perpajakan Dan Anggaran Belanja Negara Dengan Tujuan Untuk Mempengaruhi Pengeluaran Agregat Ekonomi. Kebijakan Fiskal Dapat Berupa Kebijakan Fiskal Ekspansif Dan Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan Fiskal Ekspansif Adalah Kebijakan Fiskal Yang Bertujuan Meningkatkan *Output* Perekonomian. Sebaliknya, Kebijakan Fiskal Kontraktif Bertujuan Mengurangi *Output* Perekonomian. Oleh Karena Itu, Kebijakan Fiskal Juga Merupakan Instrumen Stabilisasi Pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi Atau Peningkatan *Output* Perekonomian Menurut Solow Dipengaruhi Oleh Tabungan, Pertumbuhan Populasi, Dan Kemajuan Teknologi. Tabungan Merupakan Instrumen Yang Dipengaruhi Oleh Kebijakan Fiskal (Penerimaan Pajak Dan Belanja Negara Mempengaruhi Tabungan Nasional). Secara Tidak Langsung Kebijakan Fiskal Ikut Mengambil Peran Dalam Pertumbuhan Ekonomi. Keputusan-Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Fiskal Yang Ditempuh Suatu Negara Dapat Mengubah *Output* Dalam Perekonomian, Baik Bertambah Maupun Berkurang.

Penurunan Pajak  $T$  Maupun Peningkatan Belanja  $G$  Memiliki *Multiplier Effect* (Efek Penggandaan) Terhadap Pendapatan (*Output* Perekonomian) Suatu Negara. Alasannya ialah Pendapatan Yang Lebih Tinggi Menyebabkan Konsumsi Yang Lebih Tinggi. Kenaikan Belanja Pemerintah Menyebabkan Meningkatnya Pendapatan, Kemudian Meningkatkan Konsumsi, Yang Selanjutnya Meningkatkan Pendapatan, Kemudian Meningkatkan Konsumsi Dan Seterusnya. Besarnya Pengganda Belanja Pemerintah Yaitu: Jika  $Mpc$  0,6, Kenaikan Belanja Pemerintah  $G$  Sebesar Rp1,00 Akan Meningkatkan Pendapatan Ekuilibrium  $Y$  Sebesar Rp2,50. Sementara Itu, Besarnya Pengganda Perubahan Pajak Yaitu:

$$\frac{\Delta Y}{\Delta T} = - \frac{MPC}{1 - MPC}$$

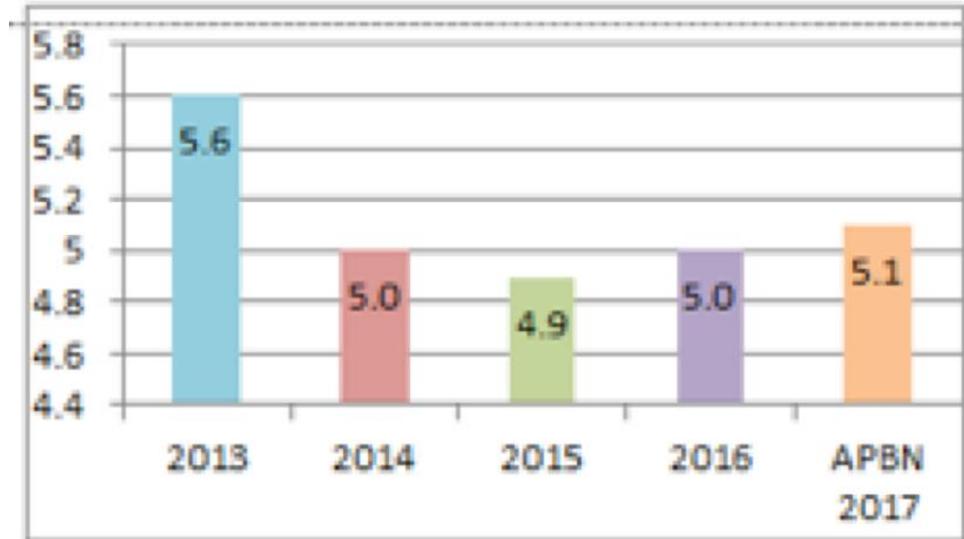
Jika  $MPC$  0,6, Penurunan Pajak  $T$  Sebesar Rp1,00 Akan Meningkatkan Pendapatan Ekuilibrium  $Y$  Sebesar Rp1,50 (Tanda Negatif Mengindikasikan Pendapatan Yang Bergerak Kea Rah Berlawanan Dari Pajak). Itulah Mengapa Kebijakan Fiskal Berkaitan Erat Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Di Indonesia, Apbn Sebagai Instrumen Utama Kebijakan Fiskal Memainkan Peranan Penting Mendorong Pencapaian Target-Target Pembangunan Yang Telah Ditetapkan. Peranan Tersebut Sejalan Dengan Salah Satu Fungsi Apbn Sebagai Alat Menjaga Stabilitas Dan Akselerasi Kinerja Ekonomi. Untuk Itu, Kebijakan Fiskal Senantiasa Diarahkan Untuk Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi, Penciptaan Lapangan Kerja, Pengentasan Kemiskinan, Namun Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan.

Pada Tahun 2013 Hingga 2017, Indonesia Menerapkan Kebijakan Fiskal Ekspansif Dari Penerapan Kebijakan Defisit. Kebijakan Ini Disebabkan Oleh Peningkatan Belanja Pemerintah  $G$  Yang Melebihi Pendapatan. Peningkatan Tersebut Salah Satunya Bertujuan Menstimulasi Perekonomian Melalui Peningkatan Alokasi Belanja Modal Untuk Infrastruktur Dalam Meningkatkan Daya Saing Dan Kapasitas Produksi.

Dampak Dari Peningkatan Belanja Pemerintah  $G$  Ialah Meningkatnya Pendapatan Ekuilibrium  $Y$  Pada Perekonomian Indonesia Dalam 5 Tahun. Namun, Peningkatan Yang Terjadi Tidak Secara Terus-Menerus. Kenyataannya, Walaupun Belanja Pemerintah  $G$  Terus Meningkat Dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Namun Persentase Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Fluktuasi Dan Cenderung Menurun.

### Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 – 2017 (Persen)



Sumber: BPS, Kementerian Keuangan

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Disebabkan Oleh Sejumlah Alasan, Diantaranya Kinerja Pertumbuhan Pdb Masih Dibayangi Oleh Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global, Khususnya Di Negara-Negara Maju Seperti Jepang Dan Kawasan Eropa. Selain Itu, Terdapat Fluktuasi Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Yang Turut Berpengaruh Pada Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi.

Jadi, Peningkatan Belanja Pemerintah G Akan Menambah *Output* Perekonomian Suatu Negara Secara Langsung. Namun Demikian, Peningkatan Itu Tidak Serta-Merta Akan Terus Terjadi Seiring Bertambahnya Belanja Pemerintah Dibanding Tahun-Tahun Sebelumnya. Hal Itu Disebabkan Oleh Faktor-Faktor Lain Yang Memperlambat Laju Pertumbuhan Ekonomi, Misalnya Perekonomian Global Yang Tidak Stabil Dan Fluktuasi Asumsi Ekonomi Makro.

#### 14. Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi Kebijakan Fiskal Diatur Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 Tentang Keuangan Negara, Yaitu Fungsi Otoritas, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Stabilisasi, Dan Distribusi

- a. **Fungsi Otoritas** Adalah Ketika Anggaran Negara Menjadi Pedoman Untuk Mencari Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Bersangkutan.

- b. **Fungsi Perencanaan** Merujuk Ketika Anggaran Negara Menjadi Dasar Bagi Manajemen Dalam Merencanakan Anggaran Tahun Yang Bersangkutan.
- c. **Fungsi Pengawasan** Adalah Ketika Anggaran Negara Menjadi Pedoman Untuk Menilai Apakah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sesuai Dengan Ketentuan Yang Telah Ditetapkan.
- d. **Fungsi Alokasi**, Yaitu Ketika Anggaran Negara Dialokasikan Untuk Tujuan Mengurangi Tingkat Pengangguran Dan Pemborosan Sumber Daya, Serta Menambah Efisiensi Dan Efektivitas Perekonomian Negara.
- e. **Fungsi Stabilisasi**, Yaitu Ketika Anggaran Pemerintah Menjadi Alat Untuk Memelihara Dan Mengupayakan Keseimbangan Fundamental Perekonomian.
- f. **Fungsi Distribusi**, Yaitu Ketika Kebijakan Negara Membuat Kebijakan Anggaran Dengan Adil Dan Rasa Keadilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kebijakan Ekonomi Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Suatu Tatanan Negara Sebagai Penstabilan Ekonomi. Pemerintah Menjalankan Kebijakan Fiskal Adalah Dengan Maksud Untuk Mempengaruhi Jalannya Perekonomian, Atau Dengan Kata Lain, Kebijakan Fiskal Pemerintah Berusaha Mengarahkan Jalannya Perekonomian Menuju Keadaan Yang Diinginkannya. Sehingga, Dengan Adanya Kebijakan Fiskal Ini Pemerintah Berharap Dapat Mengendalikan Dan Mengawasi Keadaan Ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Arofah Nur Diana. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskla Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia*. Universitas Jember. 2012

Fathurrahman Ayief. Volume 13, Nomor 1, April 2012, Hlm 72-82. *Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islma: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 72-82. Universitas Muhammdiyah Yogyakarta. 2012

Khusen Sadam.M. *Kebijakan Ekonomi (Moneter Dan Fiskal)*

Malik Ibnu. *Kebijakan Fiskal Untuk Stabilitas Perekonomian Indonesia*. Volume 05/ Nomor 09 / Agustus/ Issn : 2356-3400 *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Ekonomi Syariah*. 2018

Oktafia Renny. *Percerpatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umk) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) di Jawa Timur*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo – Ums. 2017

Salim Fahm. *Konsep dan Aplikasi Sukuk Negara Dalam Kebijakan Fiskal Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011